BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada 8 November 2017, presiden Korea Selatan Moon Jae In melakukan kunjungan ke Indonesia dalam rangka menghadiri acara Korea-Indonesia Business Forum di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta.[1] Dalam kesempatan itu, Moon Jae In menyampaikan kebijakan luar negeri baru yang akan diterapkan oleh Korea Selatan di beberapa tahun kedepan, yaitu *New Southern Policy*. Presiden Moon dalam pidatonya menyampaikan harapannya terkait *New Southern Policy* yaitu sebuah komunitas yang menghubungkan *people-to-people* dan *minds-to-minds*, sebuah komunitas perdamaian yang dapat berkontribusi terhadap perdamaian diluar asia, dan komunitas kesejahteraan dimana negara-negara ASEAN berkembang bersama dengan cara kerjasama ekonomi yang memiliki hubungan timbal balik.[2] Lebih jelasnya, strategi konkrit yang mendasari *New Southern Policy* adalah memperluas pertukaran teknologi Korea-ASEAN, *heritage*, seni dan manusia serta memperkuat kerjasama di bidang trasportasi, energi, sumber daya air dan Teknologi Informasi.[3]

New Southern Policy merupakan bagian dari konsep baru pemerintahan Moon Jae In yang diumumkan pada Juli 2017 dengan tajuk "*Northeast Asia Plus*

[1] Ji Ae, Sohn. 2017. "President Moon Unveils *New Southern Policy* for ASEAN". http://www.korea.net/NewsFocus/policies/view?articleId=151092
[2] *Ibid*
[3] *Ibid*

Community for Responsibility Sharing" dan terdiri dari 3 komponen yaitu *Northeast Asia Peace and Cooperation Platform* (NAPCP), *New Northern Policy* (NNP) dan *New Southern Policy* (NSP) itu sendiri.[4] *Northeast Asia Peace and Cooperation Platform* (NAPCP) dan *New Northern Policy* (NNP) merupakan kebijakan luar negeri Korea Selatan yang sebelumnya hampir selalu ada dalam setiap pemerintahan, sedangkan *New Southern Policy* merupakan tambahan pada pemerintahan Moon Jae In ini.[5] Adanya penambahan kebijakan ini tentunya mengindikasikan adanya kepentingan baru atau perubahan situasi yang memicu keberadaan *New Southern Policy* ini. Kebijakan itu tidak hanya diumumkan di Indonesia, namun juga diumumkan di Vietnam dan Filipina dalam rangkaian acara *Asia-Pasific Economic Cooperation* (APEC) *Summit 2017* dan *ASEAN+3 and East Asia Summit* (EAS) 2017.[6] Diumumkannya *New Southern Policy* di negara-negara yang menjadi objek dari kebijakan tersebut (Indonesia, Vietnam dan Filipina) menandai keseriusan dari Korea Selatan dalam menerapkan kebijakan luar negeri baru tersebut di ASEAN.

Pada tahun berikutnya, pemerintah Korea Selatan melanjutkan perjalanannya ke negara-negara Asia Tenggara untuk menyampaikan kebijakan *New Southern Policy* secara langsung. Presiden Moon Jae In mengunjungi Vietnam pada Maret 2018 dan Singapura pada Juli 2018 untuk menepati janjinya mengunjungi semua anggota negara ASEAN demi terwujudnya *New Southern*

[4] Jaehyon, Lee. 2019. "Korea's *New Southern Policy*: Motivations of Peace Cooperation and Implications for the Korean Peninsula". http://en.asaninst.org/contents/koreas-new-southern-policy-motivations-of-peace-cooperation-and-implications-for-the-korean-peninsula/
[5] *Ibid*
[6] *Ibid*

Policy.[7] Kunjungan pemerintah Korea Selatan di Singapura mendapat sambutan dan dukungan penuh dari perdana menteri Singapura Lee Hsien Loong yang menginginkan adanya tindakan lanjut terkait denuklirisasi di semenanjung Korea, dan pemerintah Singapura siap melakukan bagiannya dalam usaha perdamaian yang tentunya tetap berada dibawah koridor *United Nations Security Council Resolutions*.[8] Uniknya, India yang tidak termasuk dalam ASEAN ternyata juga turut menjadi negara objek dari *New Southern Policy* dan India pun menjadi agenda diplomasi utama bersamaan dengan ASEAN dalam kebijakan luar negeri tersebut.[9] Moon Jae In pada 9 Juli 2018, sebelum kunjungannya ke Singapura, ia mampir ke India untuk menghadiri India-Korea Business Forum sekaligus menyampaikan agenda *New Southern Policy* yang dinilai sejalan dengan kebijakan luar negeri India yaitu *Act East Policy*[10]. Memasukkan nama India dalam agenda *New Southern Policy* dapat dikatakan sebagai langkah yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan, mengingat kedua negara itu sebelumnya telah melakukan kerjasama ekonomi dengan baik.

Agenda promosi *New Southern Policy* berlanjut hingga pada Maret 2019 dimana presiden Moon Jae In melakukan *three-days state visit* ke negara-negara

[7] Sungnam, Lim. 2019. "Korea's *New Southern Policy*: Walk to the Border, Sail to the Island". https://www.thejakartapost.com/academia/2019/11/15/koreas-new-southern-policy-walk-to-the-border-sail-to-the-island.html
[8] Bei Yi, Seow. 2018. "*New Southern Policy* a Commitment for South Korea to Prosper with ASEAN: Moon Jae In". https://www.straitstimes.com/singapore/new-southern-policy-a-commitment-for-south-korea-to-prosper-with-asean-moon-jae-in
[9] Ferrier, Kyle. 2019. "Moon's ASEAN Trip Reinforces *New Southern Policy*". https://thediplomat.com/2019/09/moons-asean-trip-reinforces-new-southern-policy/
[10] Asian News International. 2018. "South Korean President Moon Jae-In Arrives in India on Maiden Visit". https://www.indiatoday.in/india/story/south-korean-president-moon-jae-in-arrives-in-india-on-maiden-visit-1280760-2018-07-08

anggota ASEAN, kali ini Malaysia, Kamboja dan Brunei Darussalam.[11] Pemerintah Korea Selatan menunjukkan keseriusannya terhadap kebijakan ini dengan terus-menerus melakukan promosi secara berkala. Selain itu, jadwal promosi pun diatur sedemikian rupa agar dapat bersamaan dengan acara peringatan tertentu, misalnya, kunjungan kali ini yang bersamaan dengan *Tenth Anniversary ASEAN-Korea Center*, sebuah platform kunci yang digunakan untuk promosi pertukaran berbagai bidang.[12] Dan tahun 2019 merupakan tahun dimana Korea Selatan dan ASEAN merayakan kerjasama selama 30 tahun, oleh karena itu pemerintah Korea Selatan mengadakan acara "*ASEAN-Republic of Korea Commemorative Summit"* yang diadakan di Busan, Korea Selatan pada 25-26 November 2019 dan dilanjutkan dengan acara "*MEKONG-ROK Summit"* yang diadakan pada 27 November 2019.[13] *MEKONG-ROK Summit* adalah pertemuan antara Korea Selatan dengan *Five Mekong Countries* yang terdiri Vietnam, Kamboja, Thailand, Laos dan Myanmar untuk membahas serta memperdalam kelanjutan kerjasama di di bidang budaya dan pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan agrikultur dan pedesaan, infrastruktur, informasi dan teknologi komunikasi, lingkungan serta tantangan keamanan non-tradisional.[14] Sebelumnya, presiden Moon Jae In telah mengunjungi Thailand, Laos dan Myanmar pada September 2019 sehingga pemerintah Korea Selatan telah menepati janjinya untuk mengunjungi 10 negara

[11] Parameswaran, Prashanth. 2019. "Advancing ASEAN-South Korea Relations in Moon's *New Southern Policy*". https://thediplomat.com/2019/03/advancing-asean-south-korea-relations-in-moons-new-southern-policy/
[12] *Ibid*
[13] *New Southern Policy* Guide. Presidential Committee on *New Southern Policy*. http://www.nsp.go.kr/eng/policy/policy03Page.do
[14] Xinhua. 2019. "Mekong Countries, S.Korea Agree to Deepen Cooperation After Inaugural Summit". https://www.chinadaily.com.cn/a/201911/27/WS5dde314ea310cf3e3557a637.html

anggota ASEAN secara personal demi berjalannya kebijakan *New Southern Policy*.[15]

Kebijakan luar negeri yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2017 ini kini telah menghasilkan beberapa *progres*. Salah satunya adalah meningkatnya level kerjasama bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan menjadi *Special Strategic Partnership*.[16] Kemudian, kebijakan ini juga telah siap menuju ke *New Southern Policy 2.0* pada tahun 2021 setelah pemerintah Korea Selatan mengumpulkan berbagai opini dari pemerintah negara-negara ASEAN, perusahaan, pakar dan warga sipil telah menganggap jalannya *New Southern Policy* sebelumnya berada pada jalan yang stabil dan tepat.[17] Langkah diplomasi Korea Selatan ke negara-negara Selatan sejatinya telah berlangsung sejak lama dan cukup intensif, maka dari itu kehadiran *New Southern Policy* semestinya memiliki agenda tersendiri bagi kepentingan nasional Korea Selatan berbeda dengan diplomasi-diplomasi yang sebelumnya, ditambah dengan adanya *personal diplomacy* dari Presiden Korea Selatan yang mengunjungi setiap negara-negara ASEAN. Hal ini mengindikasikan bahwa Korea Selatan telah melalui pengalaman atau kejadian di beberapa tahun sebelumnya yang memicu munculnya kebijakan *New Southern Policy*.

[15] Parameswaran, Prashanth. 2019. "The Moon Administration is Upping Its Focus on Mekong Countries as Part of Its Wider Approach to Southeast Asia". https://thediplomat.com/2019/09/the-mekong-dimension-of-south-koreas-new-southern-policy-with-asean/
[16] Pujayanti, Adrini. 2019. "Potensi dan Tantangan Kerjasama Ekonomi Indonesia-Korea Selatan". [pdf]. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI - Vol.X1, No.23/I/Puslit/Desember/2019
[17] Chi-Dong, Lee. 2019. "S.Korea Announces *New Southern Policy* 2.0 Plan After Busan Summit with ASEAN". https://en.yna.co.kr/view/AEN20191127004500315

Gambar 1. 1 Peta Persebaran Objek New Southern Policy [18]

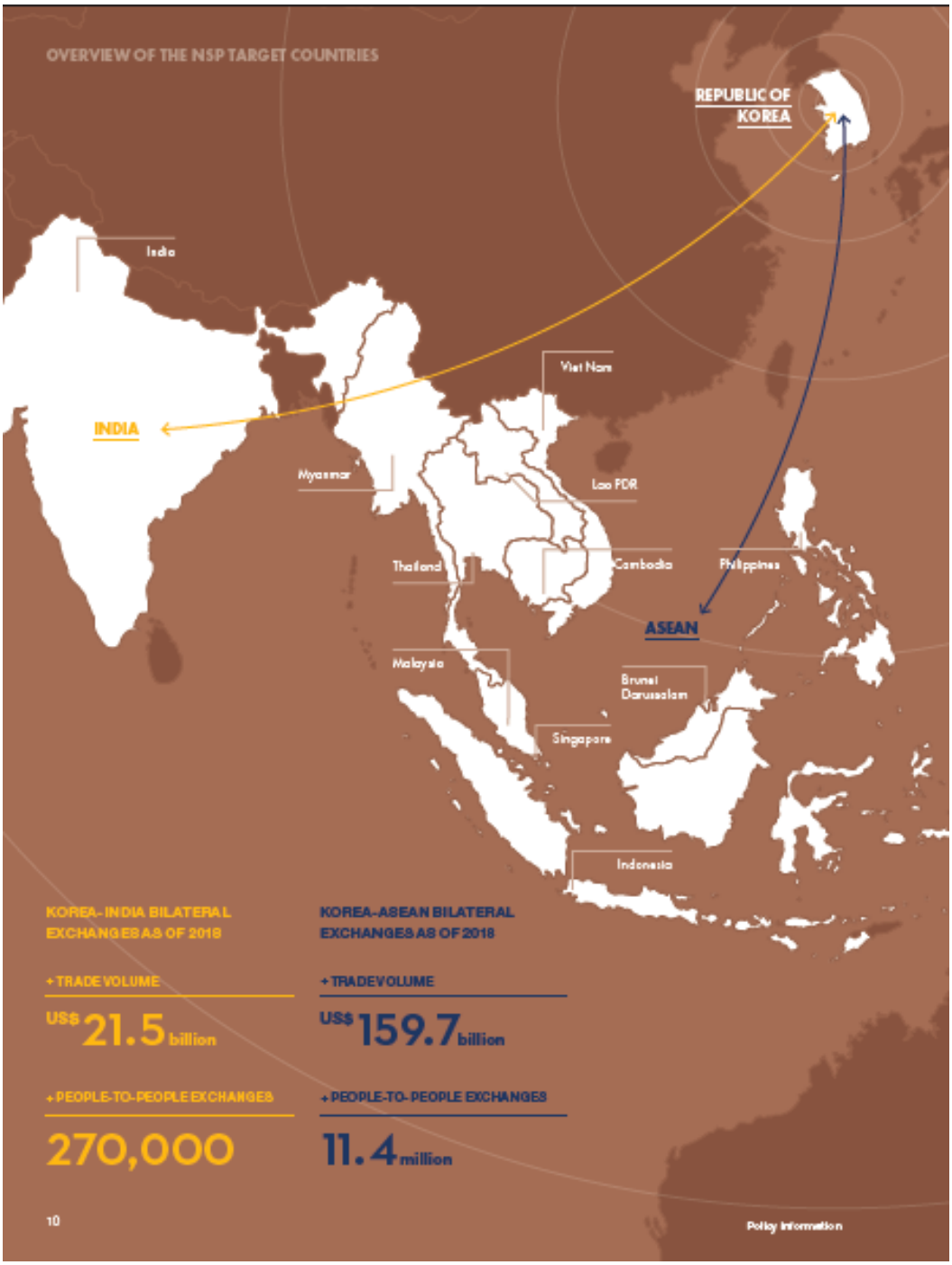

Sumber: New Southern Policy Guide. 2019. Presidential Committee on New Southern Policy.

[18] New Southern Policy Guide. 2019. Presidential Committee on New Southern Policy.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada antusiasme pemerintah Korea Selatan dalam menerapkan kebijakan *New Southern Policy* terhadap negara-negara ASEAN dan India, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah mengapa Korea Selatan mengeluarkan kebijakan *New Southern Policy* pada tahun 2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang atau faktor yang mendasari keluarnya kebijakan luar negeri baru Korea Selatan yaitu *New Southern Policy* dibawah pemerintahan Moon Jae In yang berdampak pada negara-negara ASEAN.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Strategic Environment

Strategi dalam konteks hubungan internasional didefinisikan sebagai seni atau pengetahuan untuk mengembangkan dan menggunakan instrumen-instrumen kekuatan nasional secara terpadu dalam rangka mencapai tujuan nasional maupun global.[19] Instrumen-instrumen kekuatan nasional dapat berupa politik, ekonomi, sosial-psikologi dan kekuatan militer yang digunakan untuk melindungi serta

[19] Joint Staff, J-7, *Joint Publication 1-02, Department of Defense Dictionary and Associated* Terms, Washington, DC: U.S. Joint Staff, November 30, 2004, p. 509.

mencapai kepentingan nasional berdasarkan aturan-aturan kebijakan yang telah ditetapkan.[20] Dikarenakan negara pada dasarnya adalah hasil dari politik manusia, dan konsep strategi sendiri merupakan bagian dari politik, maka dapat disimpulkan bahwa negara akan selalu berada dalam kerangka konsep strategi. Meskipun jauh dari kata sederhana, namun strategi dapat membantu para *strategist* dalam memahami kompleksitas dari *strategic environment*.[21]

Dalam konsep strategi, terdapat asumsi bahwa ketika masa depan tidak dapat diprediksi, maka *strategic environment* dapat dipelajari, diantisipasi dan dimanipulasi.[22] *Strategic Environment* dapat didefinisikan sebagai ranah dimana kepemimpinan berinteraksi dengan negara atau aktor lain dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan negara, dan lingkungan yang dimaksud dapat berupa hal-hal internal maupun eksternal, kondisi, hubungan, tren, isu, ancaman, peluang, interaksi dan dampak.[23] Unsur-unsur dinamis yang dimaksud dalam lingkungan adalah hal yang dapat diprediksi, dipelajari, diantisipasi maupun dimanipulasi. Selain itu, *Strategic Environment* bagi negara dapat berfungsi sebagai jalan untuk mempertahankan keseimbangannya saat ini atau bahkan mencari keseimbangan baru yang lebih cocok.[24]

Strategic Environment akan mulai terlihat ketika negara menyadari adanya sesuatu yang perlu diubah dan meresponnya dengan kebijakan yang dianggap akan

[20] Yarger, H.R., 2006. *Strategic theory for the 21st century: the little book on big strategy*. DIANE Publishing.
[21] *Ibid*
[22] *Ibid,* hal. 6
[23] *Ibid,* hal 17
[24] *Ibid*

memudahkan negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Sifat politik yang dimiliki suatu negara dan interaksi antar entitas politik yang berpartisipasi dalam proses politik adalah yang menentukan bagaimana lingkungan strategis akan terbentuk [25]. Pada akhinya, *strategic environment* memberikan output berupa kesejahteraan masyarakat domestik maupun global.

Gambar 1. 2 Ilustrasi aspek dari *Internal Environment* dan *External Environment* dari *Strategic Environment*[26]

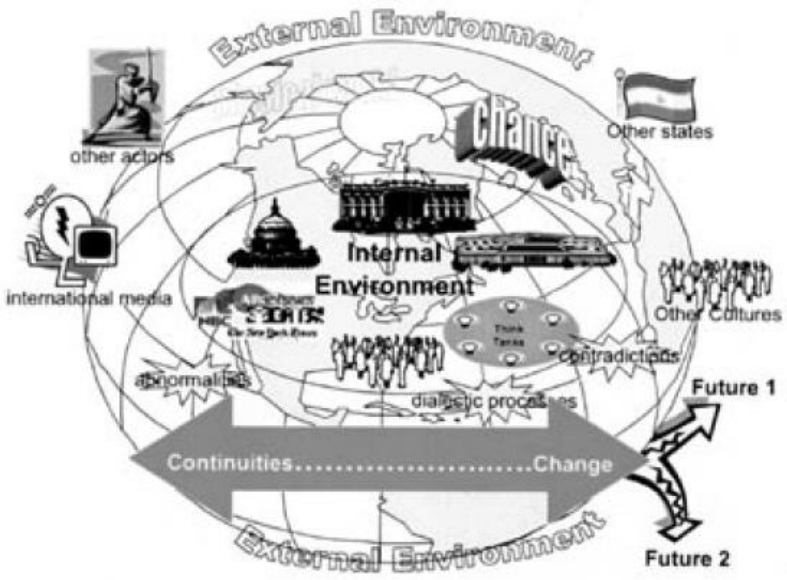

(Sumber: Yarger, H.R., 2006. *Strategic theory for the 21st century: the little book on big strategy*. DIANE Publishing)

[25] U.S Marine Corps. 2007. "U.S Marine Corps Strategy, Chapter 1: Strategy Environment". Cosimo.Inc

[26] Yarger, H.R. *Op, Cit*

1.5 Sintesa Pemikiran

Gambar 1.3 Sintesa Pemikiran

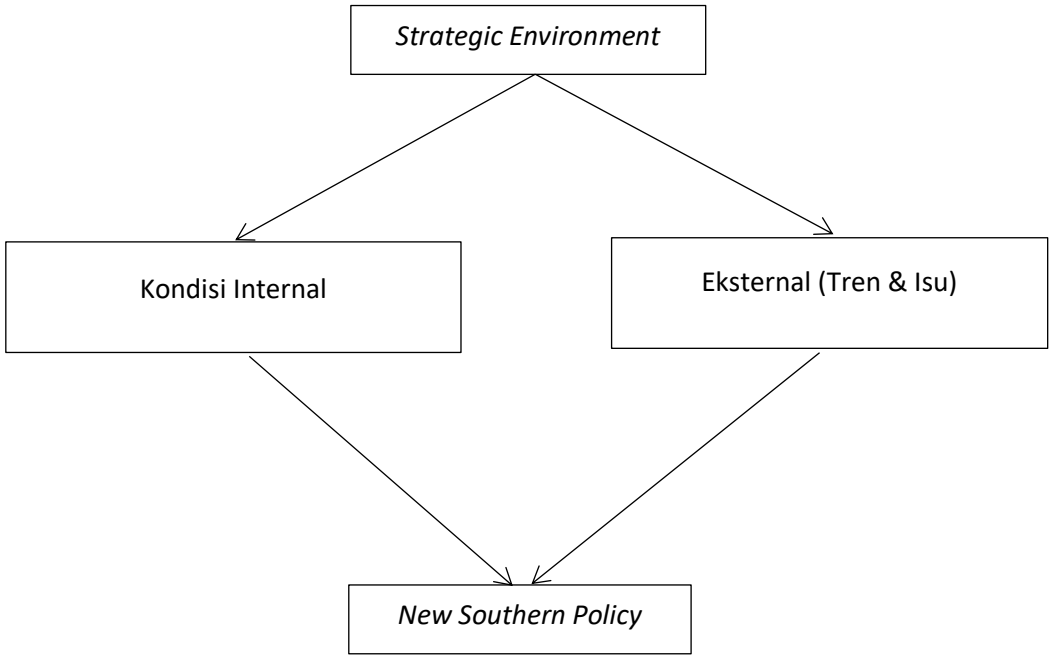

Strategic environment dapat menjadi alat untuk menjelaskan alasan mengapa pemerintah Korea Selatan mengeluarkan kebijakan *New Southern Policy* pada tahun 2017. Kondisi internal dan eksternal dari proposisi *strategic environment* akan menjadi justikasi urgensi dari pemerintah Korea Selatan terhadap keluarnya kebijakan *New Southern Policy*.

1.6 Argumen Utama

Munculnya kebijakan *New Southern Policy* oleh Korea Selatan dibawah administrasi Moon Jae In, tepatnya pada tahun 2017, telah mengindikasikan adanya perubahan kondisi internal dan situasi eksternal yang dialami Korea Selatan. Kondisi internal tersebut dapat berupa pergantian kepemimpinan, aspek ekonomi dan sosial budaya yang ada di dalam Korea Selatan. Sedangkan kondisi eksternal dapat berupa dinamika kerjasama ekonomi dengan negara lain serta tren budaya Korea Selatan yang menjamur di negara-negara Asia tenggara.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penulis melakukan penelitian terhadap faktor atau latar belakang dari keluarnya sebuah kebijakan. Maka dari itu penulis menggunakan tipe penelitian eksplanatif agar penulis dapat menjelaskan sebab-akibat dari sebuah fenomena. Selain itu, opini dari penulis terhadap data-data yang ditemukan akan lebih mudah tersampaikan.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Pengambilan waktu jangkauan penelitian oleh penulis yaitu tidak lebih dari atau melewati tahun 2017. Hal ini dikarenakan kebijakan *New Southern Policy* mulai diperkenalkan pada tahun 2017 tepatnya di Indonesia, sehingga untuk menemukan jawaban penelitian, waktu perlu ditarik mundur agar dapat mengetahui

faktor atau latar belakang keluarnya kebijakan tersebut. Rentan waktunya adalah antara pada tahun 2013 hingga 2017, hal ini berkaitan dengan awal dilantiknya presiden Park Geun Hye serta fenomena-fenomena apa yang terjadi pada pemerintahannya sehingga mendasari adanya kebijakan baru pada pemerintahan Moon Jae In.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam mengumpulkan data akan menggunakan metode tinjauan pustaka. Sumber data sekunder berupa artikel online, jurnal online dan buku akan menjadi sumber data utama bagi penulis. Hal ini dikarenakan metode tersebut dirasa lebih efektif untuk digunakan dalam penelitian ini.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang didapat melalui sumber sekunder, penulis akan menggunakan metode kualitatif. Metode ini akan membantu penulis memahami data-data dalam penelitian sosial politik yang cenderung kompleks dan tidak pasti. Selain itu, metode kualitatif membuat penulis bisa lebih mengeksplor dan mengembangkan argumen serta menjelaskan relasi antara data-data yang ada.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian kali ini, penulis membagi sistematika penulisan ke dalam 4 bab yang terdiri dari substansi-substansi sebagai berikut:

BAB I. Terdapat penjelasan mengenai latar belakang adanya penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan rumusan masalah dan tujuan penelitian, lalu kerangka pemikiran yang disertai dengan sintesa pemikiran, dan argumen utama penulis serta metodologi penelitian yang digunakan penulis.

BAB II. Dalam bab ini akan ada penjelasan lebih dalam mengenai New Southern Policy

BAB III. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai alasan munculnya kebijakan *New Southern Policy* melalui pemahaman *strategic environment* dengan proposisi kondisi internal dan eksternal yaitu berupa isu politik domestik (internal) di Korea Selatan tentang pergantian administrasi pemerintahan, signifikansi kerjasama ekonomi ROK-ASEAN & ROK-India (eksternal), tren budaya Korea di negara-negara selatan (eksternal) dan isu politik keamanan kawasan (eksternal) yang akhirnya mendorong keluarnya kebijakan *New Southern Policy*.

BAB VI. Analisis penulis yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan beserta kritik dan saran dari penulis.